

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Optimalisasi Potensi
Sumberdaya Lokal
Menghadapi MEA 2015



Yogyakarta, 23 Mei 2015



Kerjasama antara:
Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia
(PERHEPI)

SEMINAR NASIONAL

Optimalisasi Potensi Sumberdaya Lokal Menghadapi MEA 2015

Yogyakarta, 23 Mei 2015

PROSIDING

EDITOR:

Siti Yusi Rusimah

Indardi

Muhammad Fauzan

Achmad Fachruddin



**Kerjasama antara:
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
dan
Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia
(PERHEPI)**

PROSIDING SEMINAR NASIONAL
OPTIMALISASI POTENSI SUMBERDAYA LOKAL MENGHADAPI MEA 2015
Yogyakarta, 23 Mei 2015

TIM PENYUSUN

PENGARAH:

- Ir. Eni Istiyanti, MP
- Dr. Ir. Widodo, MP

EDITOR:

- Ketua : Ir. Siti Yusi Rusimah, MP
- Anggota : Dr. Ir. Indardi, MSi
Muhammad Fauzan, SP. MSc
Achmad Fachruddin, SE. MSi

DESAIN DAN TATA LETAK:

- Rohandi Azis

Diterbitkan oleh:

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Jl. Lingkar Selatan Tamantirto, Bantul. D.I.Yogyakarta 55183

Telp : +62274 387656

Faks : +62274 387646

e-mail : agribisnis@umy.ac.id, agribisnis.umy@gmail.com

Website : <http://agribisnis.umy.ac.id>

ISBN: 978-602-7577-43-5

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan kenikmatan yang telah kita terima, sehingga PROSIDING Seminar Nasional dengan tema Optimalisasi Sumberdaya Lokal Menghadapi MEA 2015 dapat diterbitkan.

PROSIDING disusun berdasarkan hasil SEMINAR NASIONAL kerjasama Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UMY dengan Perhepi Komda DIY yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2015 di Yogyakarta. Penyelenggaraan seminar dimaksudkan untuk mengenal dan memahami berbagai situasi dalam mempersiapkan masyarakat pelaku ekonomi di Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia. Sebagai negara agraris terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi sumberdaya lokal yang berlimpah. Optimalisasi sumberdaya penting dan mendesak untuk dilakukan agar produk yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi dapat bersaing dengan negara lain.

Seminar melibatkan peneliti, dosen, mahasiswa dan anggota Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), yang mempresentasikan empat makalah utama dan 47 (empat puluh tujuh) makalah pendukung. Presentasi dibagi dalam empat kelompok sub tema, yaitu Kewirausahaan dan Pasar, Teknologi dan Industri, Sumberdaya dan Kearifan Lokal, serta Kemitraan dan Komunikasi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada *keynote speech* Dr. Ir. Johnny Walker Situmorang, MS (Kementerian Koperasi dan UKM), Prof. Dr. Bambang Cipto (Rektor UMY), para narasumber Dr. Bayu Krisnamurthi, M.Si (Ketua Perhepi Pusat), H. Suharyo Husen (Direktur Pondok Ratna Farm), dan Prof. Dr. Ir. Masyhuri (Ketua Perhepi Komda DIY), tamu undangan serta seluruh peserta seminar nasional. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Perhepi Komda DIY, Program Studi Agribisnis UMY dan seluruh panitia atas terselenggaranya seminar dan terbitnya PROSIDING ini. Semoga Allah SWT meridhai semua segala usaha kita dan mencatatnya sebagai amal ibadah. Amin.

Yogyakarta, 19 Juni 2015
Ketua Panitia Seminar Nasional

Dr. Aris Slamet Widodo, SP, MSc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
Optimalisasi Potensi Sumberdaya Lokal dalam Menghadapi MEA 2015	1
Suharyo Husen	
SUBTEMA: KEWIRAUSAHAAN DAN PASAR	28
Profil dan Kinerja UMKM Pangan Olahan Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta Ummu Harmain, Slamet Hartono, Lestari Rahayu Waluyati, Dwidjono Hadi Darwanto	29
Upaya Peningkatan Keuntungan Pengrajin Batik Tulis "Labako" Melalui Aplikasi Teknologi Tool Linux Berbasis Metode Fraktal di Kabupaten Jember.....	41
Syamsul Hadi, Taufiq Timur Warisaji	
Sistem Distribusi Ternak dan Hasil Ternak Sapi Potong di Indonesia.....	52
Bambang Winarso	
Strategi Pengembangan Sukun sebagai Komoditas Unggulan Kepulauan Seribu di DKI Jakarta.....	67
Waryat, Muflihani Yanis, Kartika Mayasari	
Persepsi dan Evaluasi Pengembangan Jambu Mete di Desa Wisata Karangtengah, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.....	82
Banyuriatiga, Aris Slamet Widodo, Sriyadi	
Strategi Pemasaran Dodol Nanas Tangkit di Muara Jambi (Studi Kasus pada CV. Tulimario Tangkit Muara Jambi).....	91
Erwan Wahyudi, Adri, Endrizal	
Peluang Pengembangan Peyek Kripik Pegagan di Kawasan Rumah Pangan Lestari Cancangan, Sleman.....	103
Murwati, Nurdeana, Sutardi	
Perkembangan Komoditas Bawang Merah Indonesia dan Daya Saing di Pasar Internasional.....	110
Nanang Kusuma Mawardi	
Validasi Peluang Pasar Hasil Tangkapan dan Produk Olahan Ikan pada Masyarakat Lokal Wilayah Pesisir di Kabupaten Merauke.....	119
Untari, Dirwan Muchlis, Norce Mote, David S. Pangaribuan, Boni Lantang, Irianis Latupeirissa, Rosa D Pangaribuan, Tarsisius Kanna	
Studi Komparatif Kelayakan Usahatani Jamur Tiram Dataran Tinggi dan Dataran Rendah di DIY.....	130
Nurul Salehawati	
SUBTEMA: TEKNOLOGI DAN INDUSTRI	142
Pengembangan Mesin Sangrai Kopi Berbahan Bakar Lokal di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur.....	143
Arustiarso, Puji Widodo, Atika Hamaisa	

Penyaluran, Pengelolaan dan Kinerja Mesin Tanam Bibit Padi (<i>Rice Transplanter</i>) di Jawa Tengah.....	150
Chanifah, E. Kushartanti, D. Sahara	
Analisis Pengaruh <i>Wind Barrier</i> dan Sumur Renteng terhadap Produksi dan Risiko Usahatani Konservasi Lahan Pantai di Kabupaten Bantul.....	171
Aris Slamet Widodo	
Model Pengembangan Pertanian Perdesaan Melalui Inovasi (M-P3MI) Berbasis Kakao di Aceh Timur.....	183
Basri A. Bakar, Abdul Azis	
Efisiensi Teknis Usahatani Padi di Subak Gubug I Kabupaten Tabanan.....	194
Nyoman Ngurah Arya, I Ketut Mahaputra, Jemmy Rinaldi	
Uji Adaptasi dan Respon Petani terhadap Empat Varietas Kedelai untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Gunungkidul.....	206
Charisnalia Listyowati, Sri Wahyuni Budiarti, Eko Srihartanto	
Efisiensi Produksi Susu Kambing pada Usahatani Integrasi Tanaman Kopi-Kambing di Kecamatan Busungbiu.....	214
Nyoman Ngurah Arya, I Ketut Mahaputra, Suharyanto	
Analisis Biaya Produksi Sistem Integrasi dari Limbah Perkebunan dan Limbah Agroindustri di Kabupaten Kampar.....	225
Evy Maharani, Susy Edwina, Joko Prestiwo	
Pengembangan Teknologi Tepatguna Biogas	236
Arustiarso, Teguh Wikan W, Ahmad Ashari	
Analisis Kesesuaian Inovasi Teknologi dengan Kebutuhan Petani di Provinsi Aceh.....	245
Basri A. Bakar, Abdul Azis, Nazariah	
Efisiensi Penggunaan Alsintan dalam Usahatani di Lahan Pasir Pantai Selatan Kabupaten Bantul.....	257
Subagyo, Nugroho Siswanto	
Pengaruh Faktor Produksi dalam Penerapan Pengelolaan Tanam Terpadu (PTT) Padi Sawah di Bali.....	265
I Ketut Mahaputra, Suharyanto, Ngurah Arya	
SUBTEMA: SUMBERDAYA DAN KEARIFAN LOKAL	277
Revolusi Sumber Daya Berbasis Kearifan Lokal.....	278
Amruddin	
Analisis Komoditas Unggulan Tanaman Pangan Spesifik Lokasi di Provinsi Jambi.....	285
Adri, Erwan Wahyudi, Endrizal	
Zonasi Kawasan Terpapar Erupsi Gunung Merapi 2010 di Desa Kepuharjo sebagai Dasar Penentuan Tingkat Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Jagung (<i>Zea Mays L.</i>).....	297
Siska Ema Ardiyanti, Gunawan Budiyanto, Mulyono	
Paradigma Baru Lahan Sawah sebagai Strategi Melestarikan Sumberdaya Lokal yang Ada di Pedesaan.....	312
Markus Patiung, Erna Haryanti, Dwi Prasetyo Yudo	

Analisis Komparatif Tanaman Perkebunan dan Kebutuhan Teknologi Tanaman Karet Rakyat di Provinsi Jambi.....	324
Firdaus, Erwan Wahyudi, Adri	
Strategi Optimasi Petani Gambir di Sebuah Nagari di Limapuluh Kota, Sumatera Barat	335
Osmet	
Potensi Pembangunan Biogas di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Permasalahannya....	363
Sriyadi	
Keterkaitan Sektor Pertanian dengan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Desa Rawan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	375
Rahima Kaliky, Sri Budhi Lestari, dan Nur Hidayat	
Kinerja Usahatani Budidaya Ikan Air Tawar di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya.....	391
Fadhila Najmi Laila Hikmat, Lestari Rahayu, Siti Yusi Rusimah	
Implementasi Program Gernas Kakao dalam Rangka Menghadapi MEA di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan.....	400
Eka Triana Yuniarsih, Rahima Kaliky	
SUBTEMA: KEMITRAAN DAN KOMUNIKASI	411
Produksi Benih Padi Melalui Pola Kemitraan antara Produsen dengan Penangkar di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	412
Hano Hanafi dan Suradal	
Pola Kemitraan Usahatani Kedelai Edamame (<i>Glycine Max</i> (L) Merr) antara Petani dengan PT. Lumbang Padi di Kabupaten Garut.....	427
Carkum Cahyanto, Eni Istiyanti	
Pengelolaan Dana Penguatan Modal di Kelompok Peternak Sapi Andhini Rejo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.....	436
Budi Fajar Imaduddin, Lestari Rahayu, Siti Yusi Rusimah	
Dinamika Kelompok Usaha Budidaya Ikan Nila dengan Sistem <i>Collective Farming</i>	452
Ilham Ade Zakaria, Siti Yusi Rusimah, Sriyadi	
Pembangunan Pertanian Tanpa Kerjasama Sosial: Tantangan Menghadapi MEA 2015...	464
Endry Martius	
Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong di Indonesia Melalui Program Sarjana Membangun Desa Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong di Indonesia Melalui Program Sarjana Membangun Desa.....	476
Bambang Winarso	
Sejarah Pembangunan dan Perolehan Sertifikasi Ekolabel Hutan Rakyat Desa Sumberejo dan Selopuro.....	493
Purwanto	

Persepsi Petani terhadap Teknologi Pendampingan SL-PTT Kedelai di Gunungkidul Murwati, Sri Wahyuni dan Heri Basuki	506
Karakteristik Petani Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit yang Mempengaruhi Adopsi Inovasi di Kabupaten Pelalawan..... Susy Edwina, Evy Maharani, Bungaran Situmorang	515
Komunikasi Pembangunan untuk Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah.... Indardi	525
Keterlibatan Anggota Kelompok Wanita Tani dalam Kegiatan Lumbung Pangan..... Erlyta Dwi Hapsari, Siti Yusi Rusimah, Retno Wulandari	537
Kemitraan Petani dengan Industri Pengolah Ubi Jalar di Provinsi Jawa Barat Kurnia Suci Indraningsih	550

PEMBANGUNAN PERTANIAN TANPA KERJASAMA SOSIAL: TANTANGAN MENGHADAPI MEA 2015

Endry Martius

Universitas Andalas

endry03@yahoo.com dan endmartius@faperta.unand.ac.id

ABSTRAK

Praktek pembangunan pertanian di Indonesia pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) agaknya mengikuti saja gagasan negara kesejahteraan yang “sewenang-wenang”. Gagasan kesejahteraan disusun dengan semangat penerimaan bersama liberalisasi pasar yang berdasar kontrak sosial dengan penekanan pada keadilan upah atau prestasi di pasar. Tanpa adanya upaya mengelola risiko supremasi ekonomi yang mendominasi persaingan bebas di pasar tentu saja merupakan situasi yang tidak memungkinkan terjadinya perbaikan kesejahteraan petani lantaran otomatis terhalangi oleh rendahnya kapasitas berproduksi dari petani sendiri. Sebaliknya, upaya negara untuk membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (dekomodifikasi) melalui perangkat kebijakan sosial masih bersifat residual. Tulisan ini memperlihatkan tantangan dalam praktek pembangunan pertanian yang justru memiskinkan petani, dan lalu mengajukan gagasan tentang kewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial, yaitu prinsip yang berkenaan dengan pembagian beban dan nikmat dari suatu kerjasama sosial yang termanifestasi sebagai hak sosial korelatif petani dalam institusi yang disebut negara kesejahteraan sejati.

Kata kunci: liberalisasi pasar, keadilan sosial, kerjasama sosial, hak sosial korelatif.

PENDAHULUAN

Praktek pembangunan pertanian Indonesia ke depan pada era liberalisasi pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) agaknya akan mengikuti saja gagasan negara kesejahteraan yang terkesan “sewenang-wenang”. Gagasan kesejahteraan telah dibangun dengan semangat penerimaan bersama liberalisasi pasar berdasar kontrak sosial dengan penekanan pada keadilan upah atau prestasi di pasar. Tanpa adanya upaya untuk mengelola risiko supremasi ekonomi yang mendominasi persaingan bebas di pasar tentu saja merupakan situasi yang tidak memungkinkan terjadinya perbaikan kesejahteraan petani lantaran otomatis terhalangi oleh semakin rendahnya kapasitas berproduksi dari petani sendiri. Selain tersebut oleh penguasaan aset produktif mereka yang semakin kecil, seperti dalam hal penguasaan lahan sawah yang sudah kurang dari 0,2 hektar/petani, dan juga oleh nilai-tukar produk-produk pertanian yang selalu rendah (lihat Bappenas dan JICA, 2013). Bagi petani, kegiatan produksi sudah ibarat ‘makan buah simalakama’: hanya sekedar melanjutkan tradisi untuk menghindar dari

kehilangan kesejahteraan yang lebih besar lagi (*risk averse*). Tidak bertani berarti kehilangan sumber penerimaan.

Sebaliknya, peran aktif negara yang pada dasarnya wajib mengelola dan mengorganisir perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggungjawab untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar bagi warganya masih dalam tanda tanya. Di Indonesia, upaya negara untuk membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan dasar (dekomodifikasi) melalui perangkat kebijakan sosial tampaknya masih bersifat residual. Selain itu, kebijakan sosial itu juga belum diberikan dengan derajat penganugerahan hak-hak sosial korelatif kepada warga. Sebagai catatan, kesejahteraan dasar itu baru bisa disebut sebagai hak sosial korelatif apabila diterima sebagai kompensasi dan lalu mendapat jaminan seperti layaknya hak atas properti. Oleh sebab itu, hak sosial korelatif petani atas kesejahteraan tidak dapat dilanggar (*inviolable*) serta diberikan berbasis kewargaan (*citizenship*) dan bukan atas dasar kinerja khususnya pada pertanian atau atas dasar kedudukan sosialnya sebagai petani.

Tulisan ini memperlihatkan tantangan dalam praktek pembangunan pertanian yang justru memiskinkan petani, dan lalu mengajukan gagasan tentang kewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial adalah suatu kebaikan bersama²⁰ yang merupakan prinsip yang berkenaan dengan pembagian beban dan nikmat dari suatu kerjasama sosial yang termanifestasi dalam institusi yang disebut negara kesejahteraan yang sejati. Hanya saja, keadilan sosial hanya mungkin diwujudkan melalui kerjasama sosial yang mengajukan dan sekaligus menegaskan hak-hak sosial korelatif petani sebagai alas hak dan klaim (*entitlement*) kesejahteraan petani dari negara. Dengan begitu, tulisan ini juga berkenaan dengan telaah bagaimana hak-hak sosial korelatif petani bisa dijadikan pertimbangan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan pertanian dalam konteks liberalisasi pasar, terutama pada saat Indonesia sudah masuk sebagai salah satu negara anggota MEA. Hasil telaahan itu, jangan-jangan menyatakan kebijakan dan praktek pembangunan pertanian sebenarnya sedang berbalik ke arah yang salah. Dengan kata lain, pembangunan pertanian bisa jadi telah menjadi kesadaran diskursif yang justru menyengsarakan petani.

²⁰ Dalam pandangan pastoral Katolik, kebaikan bersama tidaklah sama dengan utilitarianisme yang mengandung arti kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar. Dalam konteks pembangunan pertanian di Indonesia, kebaikan bersama mungkin bisa diartikan sebagai adanya keberpihakan kepada petani, dan tidak pernah kebaikan yang lebih besar di selain petani dapat menjustifikasi keterpurukan petani (lihat Lebacqz, 1986: 133-134).

LIBERALISASI PASAR TANPA KERJASAMA SOSIAL

Liberalisasi pasar adalah buah pemikiran yang menghendaki kegiatan ekonomi persaingan yang berjalan lewat mekanisme pasar, dengan harapan akan terjadi efisiensi alokasi ekonomi internasional. Itu sebabnya kenapa pemikiran itu sejak awal langsung didukung oleh banyak negara, terutama negara maju kapitalis. Lalu bagaimana Indonesia menyikapinya, karena liberalisasi pasar itu sesungguhnya menawarkan tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, liberalisasi memungkinkan semakin terpuruknya perekonomian petani karena kalah dalam persaingan, namun di sisi lain berpotensi mendatangkan kemakmuran petani. Yang sekarang terjadi: penetrasi liberalisasi pasar di dalam negeri sudah semakin jauh, sementaraantisipasi dampak negatifnya justru tidak ditopang dengan suatu kesadaran diskursif yang memberi rasa aman ontologis, baik dari segi pendekatan pembangunannya yang usang ataupun dari segi kekosongan substansinya dalam hal kerjasama sosial.

Segi Pendekatan Pembangunan

Sepanjang waktu yang lalu, pembangunan pertanian yang berjalan secara paralel dengan pembangunan desa tampaknya telah mengikuti saja kemauan regim '*exogenous rural development*' (exo-rd). Inti exo-rd itu adalah teori modernisasi yang menekankan pentingnya intervensi pihak luar sebagai *prime mover* dan pasar dipakai sebagai koneksitas ekonomi secara spasial dan antara sektor pertanian dengan sektor-sektor non-pertanian. Pertumbuhan ekonomi, yang hanya dipercaya akan terjadi di kota akibat orang-orang kota yang lebih produktif, diasumsikan secara otomatis menetes (*trickle-down*) ke desa dinikmati oleh para petani. Dengan begitu, desa tak lebih hanya sebagai penghasil produk-produk primer bagi kota, dan tidak perlu dikondisikan untuk menghasilkan nilai-tambah sendiri. Namun asumsi demikian tidak berjalan. Desa dan petani justru semakin terpuruk ditekan oleh penetrasi pasar dan kapitalisme. Eksploitasi sumberdaya alam di desa berlangsung semakin cepat tanpa memperlihatkan efek kesejahteraan terhadap penduduk desa dan petani. Selain karena kebocoran ekonomi desa, hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kapasitas para petani dalam mengelola sumberdaya alam dan dalam menyerap pertumbuhan ekonomi.

Anti tesis exo-rd telah tersedia dalam regim '*endogenous rural development*' (endo-rd) yang rincian muatannya bisa dilihat pada Tabel 1. Segala konstrain teori modernisasi yang melekat pada exo-rd telah dikoreksi, yaitu dengan menggunakan acuan teori dependensi. Tujuannya adalah untuk mengakhiri ketergantungan ekonomi

desa pada kota. Masalah desa dan pertanian sebagai semata pemasok sumberdaya dan produk-produk primer bagi kota ditangani dengan optimalisasi pendayagunaan seluruh potensi lokal. Aspirasi dan inisiatif lokal dijadikan modal dan diformulasikan dalam kebijakan yang dikenal sebagai kebijakan dari bawah (*bottom-up policies*). Dalam endo-rd ini natur liberal pasar yang dianut exo-rd tetap ditolerir. Efek negatif penetrasi pasar dinilai bisa diredam melalui penguatan kapasitas kerjasama intramasyarakat desa, yaitu misalnya dengan memperkuat lembaga ekonomi koperasi, dengan maksud supaya akses pasar petani dan orang-orang desa bisa terkonsolidasi. Untuk mengatasi kebocoran ekonomi desa, integrasi pasar yang terjadi secara alami direkondisikan supaya jadi lebih “terkurung” dalam tataran geografis dan demografis tertentu. Harapannya, supaya terjadi ‘*selective spatial enclosure*’—yaitu memacu pertumbuhan ekonomi desa tertentu dan sekaligus melindunginya dari segala efek negatif penetrasi pasar (lihat Benneworth, 2013). Strategi ini dengan sendirinya akan mencegah terjadinya kebocoran kesejahteraan umum ke luar dari wilayah geografis dan demografis kesepakatan.²¹

Tabel 1. Perbandingan antara regim exo-rd dan regim endo-rd

Item Perbedaan	Regim Exo-rd	Regim Endo-rd
Prinsip kunci	<i>Economies of scale</i> dan konsentrasi	Pemakaian sumberdaya lokal (alam, manusia dan budaya) untuk pembangunan berkelanjutan
Tenaga dinamis	Kota sebagai pusat pertumbuhan (kendali exogen bagi daerah pedesaan)	Inisiatif dan usaha lokal
Fungsi-fungsi areal desa	Pangan dan produk-produk primer bagi ekspansi ekonomi kota	Ekonomi-ekonomi pelayanan yang beraneka
Masalah utama pembangunan desa	Produktivitas rendah dan terpinggirkan	Keterbatasan kapasitas area dan kelompok untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi
Fokus pembangunan desa	Modernisasi pertanian: mendorong mobilitas tenagakerja dan modal	<i>Capacity building</i> (keterampilan, institusi, prasarana): menyelesaikan soal eksklusivitas
Kritik	Bergantung, terdistorsi, pembangunan destruktif dan perintah	Tidak praktikal secara kontemporer

Sumber: Ward dkk. (2005: 4).

²¹ Optimalisasi endo-rd ini memerlukan berbagai investasi untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan sektor primer, yaitu investasi pada: (i) produksi sektor-sektor primer seperti pertanian; (ii) industri manufaktur untuk memproduksi input-input sektor primer seperti pupuk; (iii) industri pengolahan guna mendukung sektor primer seperti pengalangan produk pertanian; (iv) industri manufaktur untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga pedesaan dan pertanian; (v) industri manufaktur untuk memenuhi kebutuhan dasar kolektif seperti pendidikan.

Namun endo-rd tidak kurang pula dipersoalkan lantaran pertumbuhan ekonomi nyatanya tetap rendah. Asumsi bahwa aspirasi dan inisiatif lokal akan menjadi modal utama pembangunan ternyata dengan mudah terbelokkan dalam arena pertandingan kepentingan untuk kemenangan kapitalisme. Desa dan para petani tetap saja sebagai pecundang. Lebih jauh, ternyata inisiatif lokal tidak pernah muncul tanpa adanya kerjasama (sosial) dengan pihak eksternal. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan dari bawah tidak akan berjalan kalau tidak didukung dengan kebijakan-kebijakan pusat (*top-down policies*).

Tampaknya pokok masalah kritik terhadap regim endo-rd adalah pada keniscayaan terjadinya kebocoran ekonomi desa (tereksploitasi) padahal pembangunan desa sudah fokus pada pembangunan pertanian dan pada penguatan kapasitas lokal. Nyatanya modal sosial desa dengan mudah menjadi usang dan tidak esensial. Sebabnya bukan saja karena tuntutan kerjasama sosial untuk mengelola relasi-relasi sosial yang luas dalam konteks desa yang sudah terkoneksi dengan pasar. Semua kritik ini terpusat pada regim '*neoendogenous development*' (neoendo-rd) yang memberi sintesis dialektis pada exo-rd dan endo-rd, yang terinspirasi dari pendekatan antropologis Wallace (1956) tentang bagaimana terjadinya inovasi dalam kultur lokal. Diskusi tentang neoendo-rd ini perlu dilanjutkan secara khusus karena akan menjurus pada kesejateraan kerjasama sosial yang dinilai sebagai basis pembangunan pertanian ke depan.

Kekosongan Kerjasama Sosial

Gejala kemiskinan petani selalu direduksi sebagai konsekuensi dari rendahnya produksi dan produktivitas pertanian. Kesan ini tertanam dalam pandangan dasar bahwa kesejahteraan petani akan terangkat dengan sendirinya melalui pertumbuhan pertanian, seolah-olah pembangunan pertanian adalah sekedar urusan perbaikan sistem produksi pertanian demi pertumbuhan pertanian itu sendiri. Gejala ini demikian meluas di negara-negara sedang membangun, dimana kegiatan politik, peranan negara dan bahkan pembangunan ekonomi pada dasarnya mempunyai motif tunggal, yaitu mencari dan atau mendapatkan keuntungan ekonomi.

Sehubungan dengan itu, upaya-upaya pembangunan pertanian cenderung pula mengabaikan muatan peningkatan kesejahteraan petani. Di lapangan malah menunjukkan meluasnya praktek-praktek *rent-seeking* yang membiarkan sekelompok aktor ekonomi menikmati *priveleges* tertentu sehingga sektor pertanian tersubordinasi

perkembangannya ke dalam sektor-sektor sekunder (lihat Agustino, 2000).²² Gejala ini sudah ada jauh hari pada masa kolonial, yakni sebagai bagian dari konstruksi kolonialisme yang dengan sengaja menciptakan kerjasama sosial yang berciri dominatif, diskriminatif, eksploitatif dan dependen. Walau secara kontemporer selalu dinyatakan penting, urusan peningkatan kesejahteraan petani sering bersifat normatif-formal dan masih saja ter subordinasi dalam kepentingan pertumbuhan sektor pertanian itu sendiri. Tentu saja hal ini adalah wajah kerjasama sosial yang tidak adil, yaitu sebuah kategori ketidakadilan sosial pada dan dari sebuah negara agraris (Martius, 2004).

Keadilan sosial di Indonesia seharusnya sudah dapat dipahami dan diperjuangkan sampai pada pencapaian keadilan distributif—pemerataan dalam pembagian kesejahteraan nasional. Tidak ada jalan lain. Seakan terhukum oleh aksioma *'The Law of Diminishing Return'*, sistem produksi pertanian Indonesia yang diharapkan bisa meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian ternyata sulit menjadi efisien dan justru tidak menyejahterakan petani. Apalagi terjadi pula *trade-off* antara sektor-sektor ekonomi yang menyebabkan produk-produk pertanian bernilai rendah (*undervalue*). Profesi-profesi yang ada kaitannya dengan pertanian, terutama sebagai petani, bahkan dipandang *'underdog'*.

Masuknya pemerataan kesejahteraan nasional sebagai muatan keadilan sosial menandakan bahwa pembangunan pertanian yang berputar-putar pada urusan perbaikan sistem produksi pertanian harus dilengkapi dengan urusan-urusan perbaikan sistem redistribusi atau relokasi kesejahteraan nasional, yang berhubungan dengan seluruh dimensi moral dalam penataan politik, ekonomi, dan semua aspek kemasyarakatan lainnya. Hanya saja, soal demikian tidak diberi kesempatan untuk diangkat ke permukaan karena keadilan sosial cenderung dibayangkan dalam pengertian yang hanya berdimensi keadilan retributif, yaitu keadilan yang berkenaan dengan kontrol bagi pelaksanaan keadilan distributif, atau lebih berhubungan dengan keadilan formal dan legal (lihat Rasuanto, 2005). Jadinya keadilan sosial seakan-akan sudah ada ketika retorika keadilan distributif sudah dilakukan.

Pembicaraan tentang keadilan sosial bagi petani hanya ada dalam konteks masyarakat kebajikan agraris yang bermula dari pandangan fisiokrat Francis Quesnay, yaitu masyarakat yang mengakui keutamaan dan kebajikan pertanian bagi kesejahteraan

²² Praktek *priveleges* ini kemudian dikenal dengan istilah kapitalisme negara (*state capitalism*) yang di Indonesia ditandai dengan munculnya badan-badan usaha milik negara dan konglomerat-konglomerat produk pemberian yang bersifat kolusif.

mereka.²³ Oleh sebab itu, sebagai konsekuensi kerjasama sosial dan atas nama kebijakan pertanian itu, kesejahteraan nasional boleh dipandang sebagai hak bersama yang harus direlokasi pula kepada petani, sekalipun bagian terbesar darinya bukanlah sumbangan sektor pertanian. Pandangan serupa pernah ditegaskan oleh Paus Leo XIII, Rerum Novarum §35: kepemilikan yang adil atas aset-aset kesejahteraan mungkin tidak diperlukan, tapi pemanfaatan kesejahteraan harus secara adil (lihat Lebacqz, 1986: 124).

Masyarakat kebijakan agraris mengandaikan kesejahteraan inklusif, yaitu ketercakupan kesejahteraan petani dalam kesejahteraan nasional. Dengan begitu, penciptaan kesejahteraan nasional jelas memerlukan adanya pemisahan tugas dan kewenangan (*separation of authorities*) dari pelaku-pelaku pembangunan tetapi bukan pemisahan tujuan-tujuan (*separation of purposes*) yang akan dengan mudah saling bertentangan antar sesamanya dan dengan mudah pula menganulir tujuan peningkatan kesejahteraan petani. Tugas produsen yang dijalankan oleh petani, apabila dinyatakan sebagai bagian dari kerjasama sosial, harus diakui sebagai keperluan untuk mencapai kesejahteraan nasional, bukan untuk yang lainnya, dan bukan pula untuk pertumbuhan pertanian itu sendiri.

Pembicaraan tentang keadilan agraris semakin perlu mengingat masih banyak petani yang tidak sejahtera. Dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia tentang batas kemiskinan pada pendapatan kurang US\$ 2 per hari, angka kemiskinan di Indonesia amat tinggi, pernah mencapai sekitar 60 persen tahun 2001, dan sekitar 52 persen tahun 2007 (Ekofeum, *online*). Walau menurut BPS angka kemiskinan ini sebenarnya jauh lebih rendah, namun kecenderungan datanya seakan menganulir adanya kesejahteraan nasional, menafikan kesejahteraan nasional sebagai hak bersama, serta sekaligus mencerminkan terdapatnya ketidakadilan sosial.

JALAN YANG TERAMAT BERAT

Sejauh ini kepedulian terhadap keadilan sosial masih terarah pada isu-isu pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan nasional yang diharapkan selalu siap-sedia teredistribusi atau terelokasi ke masyarakat lapisan bawah melalui mekanisme *trickle down effect*. Namun harapan tersebut tidak terpenuhi. Pertama, dalam alam berekonomi yang semakin liberal, kerjasama sosial dengan mudah ditentukan oleh prinsip persaingan sempurna dan manusia berciri *homo-economicus* yang mementingkan diri

²³ Francis Quesnay dan para fisiokrat mengakui hanya pertanian sebagai sektor produktif yang menghasilkan surplus (*the only productive sektor and the surplus producing sektor*) (Forstater, 2007: 26-27).

sendiri, sehingga sifat serakah manusia merajalela demi mencapai tujuan efisien tertinggi—untuk produsen keuntungan tertinggi dan untuk konsumen kepuasan tertinggi (Mubyarto, 2002). Kedua, pertumbuhan ekonomi justru lebih stabil terjadi pada subsektor pertanian rakyat, sebagaimana dibuktikan dengan presedennya di masa krisis penghujung tahun 1990-an. Dengan begitu, justru kesejahteraan orang-orang desa dan petanilah yang tereksplorasi dan merembes ke kota.

Lebih jauh, dalam kronikel pembangunan pertanian Indonesia, konsep masyarakat kebajikan agraris tidak pernah ada (Furnivall, 2009). Pada masa kolonial, subsektor pangan dikendalikan dan sekaligus ditekan untuk menciptakan nilai-tambah subsektor perkebunan yang disetor ke negeri Belanda. Sebagai contoh, dengan mengusung agenda peningkatan pengadaan beras dalam negeri melalui pembangunan dan pengelolaan irigasi-irigasi di kawasan-kawasan tertentu, pemerintah kolonial Belanda berharap dapat memobilisasi pekerja atau buruh lebih murah bagi subsektor perkebunan (van der Eng, 1996). Gaya intervensi pemerintah pada masa kolonial masih bertahan hingga kini, terutama terlihat pada periode awal revolusi hijau 1970-an dan setelah adanya keperluan nasional untuk meningkatkan laju produksi sereal-bijian setelah defisit pangan tahun 1985. Ekstensifikasi maupun intensifikasi pertanian khususnya di subsektor tanaman pangan mendapat perhatian maksimum, namun tujuan kesejahteraan petani tetap terkesampingkan atau disubordinasikan ke dalam kepentingan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian itu sendiri. Lebih jauh, retorika pembangunan malahan telah memutar-balikkan pemahaman seakan-akan pertanian adalah sebagai sektor yang diutamakan, padahal yang dikorbankan.

Tataran yang disediakan bagi perbaikan ekonomi rakyat, khususnya petani, kelihatannya sudah semakin sempit. Sekalipun perbaikan teknis dan fungsional di bidang pertanian yang pada gilirannya mungkin bisa meningkatkan produktivitasnya secara amat fenomenal (200-300%), tapi itu tidak memberi keyakinan bahwa kesejahteraan petani akan terangkat. Sementara itu, perbaikan kesejahteraan petani melalui penyesuaian harga hasil-hasil pertanian, khususnya pangan, beresiko tinggi. Dengan kenaikan harga hasil pertanian, produktivitas dan margin pendapatan petani mungkin bertambah tetapi sekaligus bisa memicu inflasi. Secara teoritis cara ini akan menurunkan daya beli masyarakat secara keseluruhan dan akan menaikkan angka kemiskinan, termasuk angka kemiskinan petani sendiri.

Keadilan sosial lebih mungkin terjadi melalui penyesuaian struktur kesejahteraan nasional, yaitu melalui redistribusi atau relokasi kesejahteraan nasional kepada

penduduk miskin ataupun petani. Namun ini adalah jalan yang teramat berat untuk dilewati karena adanya keyakinan dasariah (*ontological security*) bahwa kesejahteraan nasional adalah agregasi dan fungsi dari kesejahteraan pribadi-pribadi, dan kesejahteraan masing pribadi diakui sebagai fungsi kealaman dan keteknologian yang melekat pada pribadi-pribadi yang bersangkutan. Padahal kesejahteraan nasional juga merupakan fungsi kemanusiaan, sebagai hasil kerjasama sosial yang terkondisi oleh intersubektivitas pribadi-pribadi berdasarkan ruang (intersubektivitas spasial) dan waktu (intersubektivitas temporal).

Intersubektivitas spasial mendorong munculnya perbedaan kepentingan dan masalah kesenjangan ekonomi satu generasi (*intrageneration problem*). Intersubektivitas temporal mendorong perbedaan kepentingan dan masalah kesenjangan ekonomi antargenerasi (*intergeneration problem*). Ketika kapasitas pengendalian alam (lingkungan fisik) dapat ditingkatkan, ternyata kesejahteraan petani tetap tertinggal (Winoto dan Siregar, 2008), seakan-akan menyatakan bahwa teknologi—perpanjangan tangan manusia untuk menyejahterakan diri—tidak esensial dan bahkan memperkuat struktur anti-keadilan.

CATATAN PENUTUP: KONSENSUS HAK SOSIAL KORELATIF

Soal keadilan sosial yang mencakup soal pemerataan dan keberlanjutan kesejahteraan hanya mungkin ditangani oleh dan dalam gagasan negara kesejahteraan yang sejati, yaitu melalui pengelolaan intersubektivitas dengan menetapkan konsensus bahwa kesejahteraan nasional adalah finalitas kodrati yang dapat diperlakukan sebagai aset bersama.²⁴ Siapapun boleh menikmati sampai batas agar mereka yang terbelakang (penduduk miskin atau yang kurang beruntung) tetap terlindungi. Malah seharusnya, siapapun dia, tidak lagi dipandang sebagai hanya '*human qua human*', tapi lebih dari itu sebagai '*human qua citizen*'. Menurut Giorgio Agamben (2000), kategori '*human qua human*' merujuk pada situasi manusia secara keseluruhan, dari aspeknya yang terluas dan dari kondisinya yang umum. Sedangkan kategori '*human qua citizen*' terbatas situasi dan kondisi politik dimana manusia berada dan hidup dalam konteks bagian integral politik (Baghi, 2012:15). Dengan begitu, kalau ingin mempedomani teori keadilan Rawls (1972), maka kesejahteraan nasional harus bisa tampil sebagai hak

²⁴ Konsensus tergolong nalar publik (*public reason*), yaitu bagian dari konsepsi politik yang hanya berlaku di dalam forum publik (Rawls, 1972). Dengan demikian, konsensus bukan hasil dari konsepsi moral dalam ruang privat. Rawls yakin bahwa semua manusia mempunyai energi atau sumberdaya untuk mencapai konsensus di tengah perbedaan (lihat Baghi, 2012).

sosial korelatif kesejahteraan nasional yang tidak lebih dari kondisi ketaksamaan ekonomi rakyat yang ditujukan untuk menguntungkan semua, terutama bagi mereka yang miskin atau kurang beruntung (lihat juga Sen, 1981).

Di dalam konsensus hak sosial korelatif kesejahteraan nasional tercakup apriorisme tentang nilai ambang batas kesejahteraan minimal pribadi, yang nantinya bisa dipakai sebagai dasar dan batas penentuan objek atau target perlindungan sosial. Setiap pribadi, termasuk petani, yang berada di bawah batas kesejahteraan minimal berhak untuk mengklaim perlindungan sosial dengan menerima kompensasi kesejahteraan tanpa referensi. Semua yang ada di atas batas kesejahteraan minimum adalah kreator kesejahteraan nasional yang berada pada posisi membayarkan kompensasi. Konsep kompensasi ini adalah satu cara yang telah ditawarkan Robert Nozick agar proyek keadilan distributif Rawls mempunyai landasan moralnya (Lebacqz, 1986). Dengan begitu, petani dan orang-orang miskin termasuk yang dianggap kurang beruntung akan memperoleh transfer kesejahteraan bukan karena kedermawanan orang-orang kaya, melainkan karena hak sosial korelatif atas perannya secara integratif dalam penciptaan kesejahteraan nasional (lihat Lebacqz, 1986: 89-118). Pikiran ini amat masuk akal karena secara umum pertanian Indonesia sudah terperangkap dalam 'hukum besi upah' (*the iron law of wages*) Ricardian yang mengkondisikan tingkat kesejahteraan petani amat rendah akibat memperoleh penerimaan atau pendapatan pertanian berdasar tingkat upah subsistensi yang nyaris secara permanen (lihat Forstater, 2007: 34-35).

Membuat konsensus hak sosial korelatif kesejahteraan nasional, yang di dalamnya terdapat batas kesejahteraan minimal pribadi sebagai fokus baru pembangunan pertanian, adalah kesulitan paradigmatik yang telah digiring oleh ortodoksi (ilmu) ekonomi yang menjuruskan perhatiannya pada peningkatan produksi dan produktivitas, dan kemudian cenderung mengevaluasi keadaan ekonomi dalam hal efisiensi daripada hal pemerataan kesejahteraan (subsistem redistribusi).²⁵ Ortodoksi inilah yang telah secara luas disinyalir menjadi pembatas fundamental dalam mewujudkan kebijakan dan sistem kesejahteraan nasional dan sekaligus keadilan sosial (lihat Sherraden, 2006).

²⁵ Kesulitan paradigmatik ini menggiring *paradox of plenty*. Indonesia dengan kelimpahan sumberdaya alamnya pernah untuk tidak merasa perlu menggantungkan diri dari pajak domestik dalam membiayai pembangunannya. Pembiayaan berbagai agenda pembangunan terlepas dari jerih payah rakyat sehingga menghilangkan keperluan untuk transparansi dan akuntabilitas publik. Karena ini pula, terjadi periode panjang yang tidak berpihak pada kondisi rakyat kecil—membuang kesempatan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Di Indonesia, relokasi kesejahteraan nasional untuk penduduk miskin dengan mekanisme kompensasi tanpa referensi baru dijalankan secara parsial dan acak melalui program-program atau bantuan-bantuan yang bersifat sporadis atau insidental.²⁶ Hal ini sungguh mengherankan karena di negara-negara lain yang katanya menjunjung liberalisme dan kapitalisme justru sudah lama merumuskan konsensus kesejahteraan nasional serta telah menjalankan dan memperjuangkannya secara konsisten. Misalnya di Amerika Serikat, pada tahun 1980-an, ketika ketimpangan kesejahteraan rakyatnya naik secara tajam, upaya pemerataan kesejahteraan diperjuangkan melalui perbaikan struktur pendapatan pajak progresif. Pada rentang waktu yang sama, pendeta Katolik memperkuat kebijakan tersebut dengan menulis testamen tentang ekonomi Amerika Serikat berjudul *Keadilan Ekonomi untuk Semua*, yang menegaskan perlunya batasan eksplisit atas akumulasi kesejahteraan pribadi, dan penggunaannya harus diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan material ketimbang untuk pemenuhan kebutuhan mewah (dalam Sherraden, 2006). Akhirnya, jika konsensus hak sosial korelatif kesejahteraan nasional bisa diperjuangkan, soal keadilan sosial agaknya tinggal lagi soal teknis menunaikan kompensasi tanpa referensi bagi siapa saja yang dinilai miskin atau tidak beruntung. Setuju!

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. *Ekonomi-Politik Pembangunan (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Penerbitan Dialog Press.
- Baghi, Felix (ed.). 2012. "Sekapur Sirih." Dalam *Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi*. Maumere: Penerbit Ledalero (hal. 7-49).
- Bappenas dan JICA. 2013. *Analisis Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai Bahan Penyusunan RPJM Tahun 2015-2019*. Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas.
- Ekofeum-online. *Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan strategi Pengentasannya di Indonesia*. <http://www.ekofeum.or.id/artikel.php?cid=21&display=28&entry=4>
- Fieser, James. 1992. "The Correlativity of Duties and Rights." *International Journal of Applied Philosophy*, 1992, Vol. 7, pp. 1-8.
- Forstater, Mathew. 2007. *Little Book of Big Ideas, Economics*. London: A&C Black Publishers Ltd.

²⁶ Lihatlah apa yang sedang berlangsung melalui proyek-proyek CSR (*Corporate Social Responsibilities*) yang masih menyisakan pertanyaan soal relasi-relasi sosial antara negara dan rakyat yang terprivatkan. Tampaknya tugas-tugas menolong rakyat di situ masih jauh dari keperluan memperkuat alas hak (*entitlement*) rakyat atas kesejahteraan nasional. Seluruh hak-hak korelatif selalu berpangkal pada kewajiban-kewajiban di luar kategori: (i) *duties of obedience*; (ii) *duties of charity*; dan (iii) *duties of collective entities* (Fieser, 1992).

- Furnivall, J.S. 2009. *Hindia Belanda, Studi tentang Ekonomi Majemuk* (terjemahan: *Netherlands India A Study of Plural Economy*, 1939). Jakarta: Freedom Institute.
- Lebacqz, Karen. 1986. *Teori-Teori Keadilan* (terjemahan *Six Theories of Justice*). Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Martius, Endry. 2004. "Kronikel Pembangunan dan Pengelolaan Irigasi di Indonesia: Kesepakatan Ex-Post Kesejahteraan Petani." Dalam Sudar D. Atmanto (ed.) *Kebijakan Setengah Hati dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian Petani: Beberapa Kasus dalam Pembangunan dan Pengelolaan Irigasi*. Jakarta: JKII dan PSDAL-LP3ES.
- Mubyarto. 2002. *Ekonomi Pancasila: Landasan Pikir dan Misi Pendirian Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM*. BPF, Yogyakarta.
- Rasuanto, Bur. 2005. *Keadilan Sosial: Pandangan deontologis Rawls dan Habermas, Dua teori Filsafat Politik Modern*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rawls, John. 1972. *A Theory of Justice*. Clarendon Press, Oxford.
- Sen, Amartya K. 1981. *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford: Clarendon Press.
- Syahyuti. 2012. "Pengorganisasian secara Personal dan Gejala Individualisasi Organisasi sebagai Karakter Utama Pengorganisasian Diri Petani Indonesia." *FAE*, Vol. 30, No. 2, Desember 2012 (hal. 129-145).
- Sherraden, Michael. 2006. *Aset untuk Orang Miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan* (terjemahan, *Assets and the Poor: A New American Welfare Policy*). PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Triwibowo, Darmawan dan Bahagijo, Sugeng. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan: Peran Negara dalam Produksi dan Alokasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: LP3ES dan Perkumpulan PraKarsa.
- van der Eng, Pierre. 1996. *Agricultural Growth in Indonesia: Productivity Change and Policy Impact since 1880*. Macmillan Press LTD, London.
- Wallace, Anthony F.C. 1956. "Revitalization Movements." *American Anthropologist*, New Series, Vol. 58, No. 2 (April, 1956), pp.264-281 (<http://www.jstor.org/stable/665448>)
- Ward, Neil, et.al. 2005. "Universities, the Knowledge Economy and 'Neo-Endogenous Rural Development'." *Centre for Rural Economy Discussion Paper Series No. 1*, November 2005. University of Newcastle Upon Tyne.
- Winoto, Joyo dan Siregar, Hermanto. 2008. "Agricultural Development in Indonesia: Current Problems, Issues, and Policies." *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol 6 No. 1, Maret 2008: 11-36.